

Original Research Paper

Penguatan Akses Pembiayaan Formal Petani Tembakau melalui *Focus Group Discussion* antara Petani, Perbankan, Penyuluh, dan OJK di Kabupaten Jember

Anik Suwandari¹, Mohammad Rondhi¹, Joni Murti Mulyo Aji¹, Rokhani Rokhani², Julita Hasanah¹, Cindera Rosa Damascena¹, Rizky Yanuarti¹

¹ Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Jember, Jember, Indonesia

² Program Studi Penyuluhan Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Jember, Jember, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.29303/jpmpi.v9i2.15272>

Sitasi: Suwandari, A., Rondhi, M., Aji, J. M. M., Rokhani, R., Hasanah, J., Damascena, C. R., Yanuarti, R. (2026). Penguatan Akses Pembiayaan Formal Petani Tembakau melalui *Focus Group Discussion* antara Petani, Perbankan, Penyuluh, dan OJK di Kabupaten Jember. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 9(2)

Article history

Received: 16 Mei 2026

Revised: 25 Mei 2026

Accepted: 10 Juni 2026

*Corresponding Author: Anik Suwandari, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Jember, Jember, Indonesia;
Email: anik.faperta@unej.ac.id

Abstract: Agricultural finance plays a crucial role in supporting productivity and sustainability, particularly in tobacco farming which is characterized by high capital intensity. Although access to formal financial services has been relatively available, its utilization among farmers remains limited due to various technical, social, and psychological barriers. This community service activity aims to identify key constraints in accessing agricultural finance, explore multi-stakeholder perspectives, and formulate adaptive financing solutions tailored to the characteristics of tobacco farming. A participatory approach was employed through a Focus Group Discussion (FGD) involving tobacco farmers, financial institutions, agricultural extension agents, and the Financial Services Authority (OJK). The activity was conducted in Jember Regency, one of the major tobacco-producing areas in East Java, Indonesia. The results indicate that barriers to accessing finance are not only structural, such as administrative requirements and collateral limitations, but also psychological factors, including fear of loan default and social stigma associated with formal borrowing. Additionally, financing is often used for household consumption rather than productive activities, reducing its effectiveness in supporting farm performance. From the supply side, financial institutions face high risks due to production uncertainty and price volatility, while regulators emphasize the importance of improving financial literacy among farmers. The FGD facilitated the integration of perspectives among stakeholders, leading to shared understanding and context-specific solutions. This study highlights that enhancing financial inclusion in the agricultural sector requires a collaborative approach, strengthening financial literacy, and developing flexible financing schemes aligned with seasonal farming patterns.

Keywords: Agricultural Finance; Tobacco Farmers; Financial Inclusion; Focus Group Discussion; Participatory Approach; Agricultural Extension

Pendahuluan

Pembiayaan pertanian merupakan faktor kunci dalam mendukung produktivitas dan keberlanjutan usaha tani. Akses terhadap pembiayaan memungkinkan petani untuk

memenuhi kebutuhan modal, seperti pembelian input produksi, adopsi teknologi, serta pengembangan infrastruktur usaha tani, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kinerja dan pendapatan petani (Landsman, Peña-Romera and Zhao, 2024).

Komoditas tembakau memiliki peran strategis baik pada perekonomian nasional. Tembakau menjadi salah satu komoditas perkebunan yang berkontribusi terhadap penerimaan negara serta menjadi sumber penghidupan utama bagi petani, khususnya di daerah sentra produksi seperti Kabupaten Jember (Sahadewo et al., 2024). Selain itu, usaha tani tembakau juga memiliki nilai sosial-budaya karena telah menjadi praktik yang diwariskan secara turun-temurun (Appau et al., 2019; Sahadewo et al., 2021).

Namun demikian, usaha tani tembakau dihadapkan pada berbagai permasalahan, terutama terkait kebutuhan pembiayaan yang tinggi. Karakteristik usaha tani tembakau yang padat modal menyebabkan kebutuhan biaya produksi relatif besar dibandingkan komoditas lainnya (Sahadewo et al., 2020). Di sisi lain, sebagian besar petani tembakau merupakan petani skala kecil dengan keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan formal (Sahadewo et al., 2021). Kondisi ini diperparah oleh karakteristik pemasaran tembakau dalam bentuk daun kering yang meningkatkan biaya pascapanen dan transaksi (Promphakping, Chamaratana and Somaboot, 2021).

Selain kendala struktural, petani juga menghadapi risiko harga yang tinggi dan pola pendapatan yang bersifat musiman, sehingga menyulitkan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman (Zhang and Chen, 2023). Meskipun akses terhadap layanan keuangan formal telah tersedia, tingkat pemanfaatannya masih rendah. Hal ini tercermin dari kondisi di negara berkembang, di mana hanya sebagian petani yang benar-benar menggunakan pembiayaan formal, sementara sebagian besar masih bergantung pada sumber informal (Demirgüç-Kunt et al., 2022).

Berbagai studi menunjukkan bahwa rendahnya pemanfaatan pembiayaan formal tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis seperti agunan dan prosedur, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan psikologis, seperti kurangnya pemahaman, rasa enggan berinteraksi dengan lembaga keuangan, serta persepsi negatif terhadap pinjaman (Khan et al., 2024). Di sisi lain, masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan petani dengan skema pembiayaan yang disediakan oleh lembaga keuangan dan regulator (Karyani et al., 2024).

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan akses pembiayaan pertanian tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi penting sebagai sarana untuk menjembatani komunikasi antara petani, penyuluh pertanian, perbankan, dan regulator.

Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan petani tembakau, lembaga keuangan, penyuluh pertanian, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara langsung permasalahan yang dihadapi petani dalam mengakses pembiayaan, meningkatkan pemahaman petani terhadap skema pembiayaan formal, serta merumuskan solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik usaha tani tembakau. Melalui pendekatan partisipatif ini, diharapkan dapat tercipta sinergi antar pemangku kepentingan dalam mendorong peningkatan inklusi keuangan di sektor pertanian, khususnya bagi petani tembakau, sehingga pembiayaan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yaitu petani tembakau, lembaga keuangan, penyuluh pertanian, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pendekatan ini dipilih karena mampu menjembatani kesenjangan informasi dan kepentingan antara pengguna (petani), penyedia (lembaga keuangan), dan regulator dalam sistem pembiayaan pertanian. Pendekatan partisipatif dinilai efektif dalam menggali permasalahan secara kontekstual sekaligus mendorong terciptanya solusi bersama yang lebih aplikatif dan berkelanjutan (Mbunga et al., 2023).

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD) yang bertempat di Hall Fakultas Pertanian, Universitas Jember pada tanggal 17 September 2025. Lokasi ini dipilih karena Kabupaten Jember merupakan salah satu sentra produksi tembakau di Jawa Timur, sehingga relevan sebagai lokasi kajian dalam

memahami dinamika akses pembiayaan petani tembakau.

Sasaran kegiatan melibatkan perwakilan dari masing-masing pemangku kepentingan, yaitu petani tembakau sebagai pengguna pembiayaan (n=2), lembaga keuangan sebagai penyedia pembiayaan (n=8), penyuluh pertanian sebagai fasilitator lapangan (n=1), serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator (n=1). Keterlibatan multipihak ini bertujuan untuk memperoleh perspektif yang komprehensif dari sisi permintaan, penawaran, serta regulasi dalam sistem pembiayaan pertanian.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah tahap persiapan, yang meliputi identifikasi awal permasalahan akses pembiayaan melalui diskusi dengan penyuluh pertanian dan pihak OJK,

Melalui interaksi antar pemangku kepentingan, kegiatan ini juga bertujuan untuk merumuskan solusi pembiayaan yang lebih adaptif, khususnya melalui penguatan peran penyuluh pertanian sebagai fasilitator dalam menjembatani kebutuhan petani dengan lembaga keuangan. Metode FGD dipilih karena memungkinkan terjadinya dialog langsung dan pertukaran informasi antar pihak, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif serta solusi yang lebih kontekstual.

Tahap terakhir adalah tahap evaluasi, yang dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan. Evaluasi difokuskan pada tingkat partisipasi dan keterlibatan peserta, peningkatan pemahaman peserta terhadap pembiayaan formal, serta kesesuaian solusi yang dihasilkan dengan kebutuhan petani. Proses evaluasi dilakukan secara kualitatif melalui pengumpulan umpan balik dari peserta selama dan setelah kegiatan berlangsung. Pendekatan ini memungkinkan penilaian yang lebih mendalam terhadap dampak kegiatan pengabdian, khususnya dalam aspek peningkatan pemahaman dan perubahan persepsi peserta terhadap pembiayaan formal.

Secara keseluruhan, metode yang digunakan dalam kegiatan ini tidak hanya berfungsi untuk mengidentifikasi permasalahan, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran bersama (*social learning*) yang mendorong terbentuknya sinergi antar pemangku kepentingan dalam mendukung peningkatan inklusi keuangan di sektor pertanian

koordinasi dengan pihak terkait dalam penentuan peserta kegiatan, serta penyusunan materi diskusi yang mencakup aspek akses pembiayaan, kendala yang dihadapi, dan alternatif solusi yang memungkinkan. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan relevan dengan kebutuhan lapangan dan memiliki arah yang jelas.

Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan, yang dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD). Dalam tahap ini, dilakukan eksplorasi mendalam terhadap permasalahan utama yang dihadapi petani dalam mengakses pembiayaan, termasuk kendala struktural, sosial, dan psikologis. Selain itu, diskusi juga menggali perspektif dari lembaga keuangan dan regulator terkait mekanisme penyaluran pembiayaan serta kebijakan.

Hasil dan Pembahasan

1. Persepsi dan Pengalaman Petani terhadap Pembiayaan Formal

Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) menunjukkan bahwa petani tembakau sebagai pengguna utama pembiayaan memiliki persepsi yang cukup kompleks terhadap lembaga keuangan formal. Di satu sisi, petani menyadari pentingnya pembiayaan untuk mendukung usaha tani yang bersifat padat modal. Namun di sisi lain, terdapat hambatan psikologis yang cukup kuat dalam mengakses layanan tersebut (Moahid & Maharjan, 2020).



Gambar 1. Peserta *Focus Group Discussion*

Petani mengungkapkan adanya rasa khawatir terhadap risiko gagal bayar akibat ketidakpastian hasil panen dan fluktuasi harga (Zhang & Chen, 2023). Selain itu, muncul pula rasa enggan dan malu ketika harus berinteraksi dengan lembaga keuangan formal, terutama karena proses

survei lapangan yang dinilai dapat menimbulkan persepsi negatif di lingkungan sosial (Hiranya & Joshi, 2025).

Dalam diskusi, petani juga menyampaikan bahwa pembiayaan yang diperoleh tidak hanya digunakan untuk kegiatan usaha tani, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan berfungsi sebagai penyangga ekonomi keluarga, sehingga tidak sepenuhnya diarahkan untuk kegiatan produktif. Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak pada terbatasnya modal yang tersedia untuk kegiatan budidaya (Boucher et al., 2023).

2. Perspektif Lembaga Keuangan terhadap Pembiayaan Petani

Dari sisi lembaga keuangan, pembiayaan kepada petani tembakau dipandang sebagai sektor yang memiliki potensi, namun juga mengandung risiko yang relatif tinggi. Risiko tersebut terutama berkaitan dengan ketidakpastian produksi dan fluktuasi harga komoditas, yang dapat memengaruhi kemampuan petani dalam mengembalikan pinjaman.



Gambar 2. Pemberian Cenderamata kepada Perwakilan Lembaga Keuangan

Pihak lembaga keuangan menyampaikan bahwa berbagai skema pembiayaan sebenarnya telah disediakan untuk mengakomodasi kebutuhan petani, termasuk skema pembayaran musiman yang disesuaikan dengan siklus usaha tani. Namun demikian, implementasi di lapangan belum sepenuhnya optimal, salah satunya karena keterbatasan komunikasi dan sosialisasi kepada petani.

Selain itu, lembaga keuangan juga menghadapi tantangan dalam hal persyaratan agunan dan kelayakan kredit. Keterbatasan

dokumen legal kepemilikan aset serta kondisi administrasi petani seringkali menjadi kendala dalam proses penyaluran pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi penyedia, diperlukan mekanisme yang lebih adaptif dalam menyesuaikan karakteristik petani sebagai debitur.

4.3 Perspektif OJK sebagai Regulator

Sebagai regulator, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran dalam memastikan tersedianya akses pembiayaan yang inklusif bagi masyarakat, termasuk petani. Dalam FGD, pihak OJK menekankan bahwa berbagai program pembiayaan telah dirancang untuk mendukung sektor usaha kecil, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).



Gambar 3. Pemberian Cenderamata kepada OJK

Namun demikian, dalam implementasinya terdapat beberapa tantangan, seperti pembatasan akses dalam program tertentu yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan, tetapi di sisi lain justru membatasi petani yang membutuhkan pembiayaan berkelanjutan. Selain itu, OJK juga menyoroti pentingnya peningkatan literasi keuangan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman petani terhadap produk dan risiko pembiayaan.

OJK memandang bahwa peningkatan inklusi keuangan tidak hanya bergantung pada penyediaan produk, tetapi juga pada kemampuan masyarakat dalam memahami dan memanfaatkan layanan keuangan secara tepat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dengan berbagai pihak untuk memperkuat edukasi dan pendampingan kepada petani.

4.4 Peran Penyuluh Pertanian sebagai Fasilitator

Penyuluh pertanian memiliki peran strategis sebagai penghubung antara petani dengan lembaga keuangan dan regulator. Dalam FGD, penyuluh mengungkapkan bahwa salah satu permasalahan utama adalah rendahnya pemahaman petani dalam membedakan antara kebutuhan usaha tani dan kebutuhan rumah tangga.

Selain itu, penyuluh juga menyoroti bahwa petani seringkali mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif, seperti penyediaan dokumen agunan. Dalam praktiknya, dokumen seperti BPKB atau sertifikat tanah tidak selalu tersedia atau mudah diakses oleh petani, sehingga menjadi hambatan dalam pengajuan pembiayaan.

Penyuluh juga menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan, tidak hanya pada tahap pengajuan pembiayaan, tetapi juga dalam pengelolaan keuangan dan penggunaan dana. Dengan adanya pendampingan yang lebih intensif, diharapkan petani dapat memanfaatkan pembiayaan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

4.5 Integrasi Perspektif Petani, Lembaga Keuangan, Penyuluh Pertanian, dan OJK

Hasil FGD menunjukkan bahwa permasalahan pembiayaan pertanian bersifat multidimensional dan melibatkan berbagai pihak dengan perspektif yang berbeda. Petani menghadapi kendala psikologis dan keterbatasan pemahaman, lembaga keuangan menghadapi risiko kredit dan kendala administratif, OJK berfokus pada regulasi dan perlindungan, sementara penyuluh berperan sebagai fasilitator di lapangan.



Gambar 4. Integrasi Perspektif Petani, Lembaga Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Penyuluh Pertanian oleh Tim Peneliti

Melalui FGD, berbagai perspektif tersebut dapat dipertemukan dalam satu forum dialog yang terbuka. Interaksi langsung antar pemangku kepentingan memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, klarifikasi permasalahan, serta penyusunan solusi secara bersama.

FGD juga berperan dalam mengurangi kesenjangan informasi antara petani dan lembaga keuangan, meningkatkan pemahaman petani terhadap produk pembiayaan, serta memperkuat kepercayaan terhadap lembaga keuangan formal. Selain itu, FGD mendorong terbentuknya sinergi antar lembaga dalam mendukung peningkatan inklusi keuangan di sektor pertanian.

4.6 Implikasi Kegiatan Pengabdian

Berdasarkan hasil kegiatan, dapat disimpulkan bahwa peningkatan akses pembiayaan pertanian memerlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sosial dan kelembagaan. Diperlukan upaya peningkatan literasi keuangan petani, penyederhanaan prosedur pembiayaan, serta pengembangan skema pembiayaan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan karakteristik usaha tani.

Selain itu, peran penyuluh perlu diperkuat sebagai fasilitator dalam mendampingi petani, sementara lembaga keuangan dan regulator perlu meningkatkan komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Pendekatan partisipatif melalui FGD terbukti efektif dalam menjembatani kepentingan antar pemangku kepentingan serta menghasilkan solusi yang lebih kontekstual. Dengan demikian, kegiatan pengabdian berbasis FGD multipihak ini dapat menjadi model intervensi yang relevan dalam mendorong peningkatan inklusi keuangan dan keberlanjutan usaha tani tembakau.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian melalui *Focus Group Discussion* (FGD) diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Permasalahan utama akses pembiayaan petani tembakau bersifat multidimensional.

Kendala yang dihadapi petani tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis. Petani cenderung mengalami kekhawatiran terhadap risiko gagal bayar, keterbatasan pemahaman terhadap prosedur pembiayaan, serta adanya stigma sosial dalam mengakses pembiayaan formal. Selain itu, pembiayaan yang diperoleh belum sepenuhnya

dimanfaatkan secara produktif karena juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

2. Terdapat perbedaan perspektif antara petani, lembaga keuangan, dan regulator dalam melihat pembiayaan pertanian.

Petani memandang pembiayaan sebagai kebutuhan mendesak namun berisiko tinggi, lembaga keuangan melihat sektor pertanian sebagai sektor potensial tetapi memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi, sementara regulator berfokus pada perluasan akses dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian. Perbedaan perspektif ini menunjukkan adanya kesenjangan informasi dan komunikasi yang memengaruhi efektivitas penyaluran dan pemanfaatan pembiayaan pertanian.

3. Kegiatan FGD mampu menjadi media efektif dalam menjembatani perbedaan perspektif antar pemangku kepentingan.

Melalui diskusi partisipatif, petani memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai skema pembiayaan formal, sementara lembaga keuangan dan regulator mendapatkan gambaran yang lebih nyata terkait kondisi dan kebutuhan petani di lapangan. Interaksi ini mendorong terciptanya komunikasi yang lebih terbuka serta memperkuat kepercayaan antar pihak.

4. Diperlukan solusi pembiayaan yang lebih adaptif dan kontekstual.

Skema pembiayaan yang ada saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan karakteristik usaha tani tembakau yang bersifat musiman. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan model pembiayaan yang lebih fleksibel, khususnya dalam hal sistem pembayaran yang disesuaikan dengan siklus pendapatan petani, serta penyederhanaan prosedur agar lebih mudah diakses.

5. Penguatan peran penyuluh pertanian menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas pembiayaan.

Penyuluh berperan strategis sebagai fasilitator dalam menjembatani komunikasi antara petani, lembaga keuangan, dan regulator. Selain itu, penyuluh juga memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi keuangan petani, mendampingi proses pengajuan pembiayaan, serta memastikan penggunaan dana yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Saran

Kegiatan pengabdian yang dilakukan saat ini masih terbatas pada tahap identifikasi permasalahan dan diskusi solusi, sehingga diperlukan tindak lanjut berupa program pendampingan berkelanjutan untuk memastikan implementasi solusi yang telah dirumuskan. Pendampingan ini penting untuk mengevaluasi sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan dapat diterapkan dan memberikan dampak nyata bagi petani.

Selain itu, dalam pelaksanaan FGD perlu diperhatikan pengelolaan dinamika diskusi agar partisipasi peserta lebih merata dan tidak didominasi oleh pihak tertentu. Penggunaan teknik fasilitasi yang lebih terstruktur dapat membantu menggali perspektif yang lebih beragam dan mendalam. Keterbatasan waktu dalam kegiatan juga menjadi perhatian, sehingga pada kegiatan selanjutnya diperlukan alokasi waktu yang lebih memadai agar pembahasan dapat dilakukan secara lebih komprehensif, khususnya terkait aspek teknis pembiayaan dan implementasi kebijakan.

Daftar Pustaka

- Afila, N., Muksin, M., & Suryadi, U. (2020). Analysis of the economic dimension sustainability of the Na-Oogst tobacco business in Jember. *Journal of Agri Socio Economics and Business*, 2(1), 23–30. <https://doi.org/10.31186/jaseb.2.1.23-30>
- Appau, A., Drope, J., Witoelar, F., Chavez, J. J., Lencucha, R., Li, Q., & Labonte, R. (2019). Why do farmers grow tobacco? A qualitative exploration of farmers' perspectives in Indonesia and the Philippines. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(13). <https://doi.org/10.3390/ijerph16132330>
- Boucher, C., Jasinski, A., & Tokpavi, S. (2023). Conditional mean reversion of financial ratios and the predictability of returns. *Journal of International Money and Finance*, 137, 102907. <https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2023.102907>
- Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., Ansar, S., & Hess, J. (2022). *The Global Findex*

- Database 2021: Financial inclusion, digital payments, and resilience in the age of COVID-19*. World Bank.
- Hardiansyah, M. K., Hamid, H., & Alwany, T. (2025). The effect of production costs on the income of tobacco farmers in East Lombok Regency, Indonesia. [*Nama jurnal*], 6(2), 90–101.
- Hiranya, J., & Joshi, H. G. (2025). Bridging the psychological and policy gaps: Enhancing farmer access to agricultural credit in India. *Acta Psychologica*, 255, 104890. <https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2025.104890>
- Karyani, T., et al. (2024). Factors affecting coffee farmers' access to financial institutions: The case of Bandung Regency, Indonesia.
- Khan, F. U., et al. (2024). Constraints to agricultural finance in underdeveloped and developing countries: A systematic literature review. *International Journal of Agricultural Sustainability*, 22(1). <https://doi.org/10.1080/14735903.2024.2329388>
- Landsman, W. R., Peña-Romera, F. D., & Zhao, J. (2024). The value of lending to bellwether firms by institutional investors. *Journal of Accounting and Economics*. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2024.101735>
- Moahid, M., & Maharjan, K. L. (2020). Factors affecting farmers' access to formal and informal credit: Evidence from rural Afghanistan. *Sustainability*, 12(3), 1268. <https://doi.org/10.3390/su12031268>
- Promphakping, B., Chamaratana, T., & Somaboot, P. (2021). Why does tobacco agriculture persist in Thailand? [*Nama jurnal*], 5, 543–558.
- Sahadewo, G. A., et al. (2020). *The economics of tobacco farming in Indonesia: Results from two waves of a farm-level survey*. University of Illinois.
- Sahadewo, G. A., et al. (2021). Tobacco or not tobacco: Predicting farming households' income in Indonesia. *Tobacco Control*, 30(3), 320–327. <https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2019-055274>
- Sahadewo, G. A., et al. (2024). Assessing the level of poverty and utilization of government social programs among tobacco farmers in Indonesia. *Nicotine & Tobacco Research*, 26(9), 1132–1140. <https://doi.org/10.1093/ntr/ntae050>
- Zhang, R., & Chen, R. (2023). The regulatory effect of cooperation degree in increasing tobacco farmers' income by mitigating production risk shocks. *Annals of Public and Cooperative Economics*, 94(4), 1323–1344. <https://doi.org/10.1111/apce.12410>